

KRISIS EKONOMI

Krisis adalah istilah lama dalam teori siklus bisnis, merujuk pada perubahan tajam menuju resesi, titik balik ditandai oleh kemajuan atau kemunduran yang tajam.

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia krisis adalah keadaan yang berbahaya, keadaan genting, kemelut, dengan suram dalam berbagai hal seperti ekonomi dan moral. Krisis ekonomi adalah transisi yang tajam dimana terjadi penurunan siklus bisnis dan secara umum memperlambat kegiatan perekonomian. Perubahan ekonomi yang terjadi secara cepat tersebut mengarah pada turunnya nilai tukar mata uang dan harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi. Krisis ekonomi dapat melanda suatu Negara apabila perubahan ekonomi sudah tidak dapat dibendung lagi.

Proses terjadinya krisis ekonomi mempunyai 2 sifat yang berbeda yaitu :

- 1) Secara mendadak atau muncul tanpa ada tanda-tanda sebelumnya. (goncangan ekonomi tak terduga).
- 2) Krisis Ekonomi yang sifatnya tidak mendadak, dimana melalui suatu proses akumulasi yang cukup panjang. Seperti krisis ekonomi global (periode 2008 – 2009). Diawali dengan krisis keuangan serius di AS akhirnya merembet ke negara-negara maju (Jepang, dan Eropa)

Krisis ekonomi dibedakan menurut jenis dan sumbernya Menurut Jenisnya yaitu :

- 1) Krisis nilai tukar, yang ditandai oleh depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar,
- 2) Krisis utang luar negeri yang besar jumlahnya, yang dibuat oleh swasta dan pemerintah.
- 3) Mungkin juga dihinggapai krisismenurunnya kepercayaan masyarakat terhadap berbagai institusi ekonomi dan finansial.

Berdasarkan sumbernya krisis ekonomi bersumber dari :

- 1) Dalam (Internal) , misalnya : sektor pertanian (gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrim yang tidak terantisipasi sebelumnya, bencana alam (banjir),
- 2) Luar (Eksternal) , krisis ekonomi global 2008-2009
Krisis ekonomi berasal dari sumber-sumber yang berbeda juga mempunyai proses dan jalur-jalur transmisi dampak yang berbeda

B. JENIS-JENIS KRISIS EKONOMI

1. Krisis Produksi

Krisis produksi adalah termasuk tipe krisis ekonomi yang bersumber dari dalam negeri .Krisis ini bidang dalam bentuk penurunan produk domestik secara mendadak dari sebuah komoditas pertanian, contohnya : padi/beras.Penurunan produksi tersebut berakibat langsung pada penurunan tingkat pendapatan riil dari para petani dan para buruh tani padi

Dalam tipe ini , jalur-jalur transmisi dampaknya terhadap kemiskinan adalah perubahan-perubahan dalam harga (inflasi), jumlah kesempatan kerja dan tingkat pendapatan.Kelompok-kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap tipe krisis ini adalah petani dan keluarganya , buruh tani dan keluarganya , dan pada peringkat berikutnya adalah para pekerja dan pemilik usaha serta keluarga mereka di sektor lainnya yang terkait lewat produksi dengan subsektor pertanian.

2. Krisis Perbankan

Dampak langsung atau fase pertama dari efek krisis perbankan adalah kesempatan kerja dan pendapatan yang menurun di subsektor keuangan tersebut. Pada fase kedua, krisis perbankan merembet ke perusahaan-perusahaan yang sangat tergantung pada sektor perbankan dalam pembiayaan kegiatan produksi / bisnis mereka.Perusahaan tersebut tidak bisa mendapatkan pinjaman dari perbankan karena subsektor keuangan tersebut sedang mengalami kekurangan atau kebangkrutan atau perusahaan masih dapat kredit tapi tetapi dengan tingkat suku bunga pinjaman (R) yang jauh lebih tinggi dibandingkan pada saat perbankan

dalam keadaan normal. Kenaikan suku bunga disebabkan oleh permintaan kredit dunia usaha yang besar di satu sisi dan disisi lain dana yang terkumpul dari pihak tinggi untuk di salurkan sebagai kredit usaha yang terbatas.

Dalam tipe krisis ini , jalur-jalur tranmisi paling utana lewat mana krisis tersebut berdampak pada tingkat kemiskinan yaitu : perubahan dalam arus kredit dari perbankan ke dunia usaha atau tingkat suku bunga pinjaman , volume produksi , jumlah kesempatan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Kelompok-keompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis ini adalah bukan masyarakat miskin melainkan masyarakat kelas menengah keatas.

3. Krisis Nilai Tukar

Perubahan kurs dari sebuah mata uang , misalnya rupiah terhadap dollar AS dianggap krisis apabila kurs dari mata uang tersebut mengalami penurunan atau depresiasi yang sangat besar yang prosesnya mendadak dan berlangsung secara terus-menerus yang membentuk sebuah tren yang meningkat. Dampak langsung krisis ini adalah pada ekspor dan impor. Menurut teori konvensional mengenai perdagangan internasional depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang terhadap misalnya dollar AS yang membuat daya saing harga dari produk-produk buatan negara dari mata uang tersebut membaik, yang selanjutnya membuat volume ekspor meningkat. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa faktor-faktor lain yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung volume ekspor konstan tidak berubah.

Jadi depresiasi nilai tukar dari suatu mata uang pada dasarnya berdampak positif terhadap ekonomi dari negara yang mata uangnya mengalami pelemahan lewat sisi ekspor dan berdampak negatif lewat sisi impor.

4. Krisis Perdagangan

Dalam krisis ekonomi yang berasal dari sumber eksternal ada dua jalur utama yaitu perdagangan dan investasi / arus modal. Didalam jalur perdagangan internasional ada 2 sub jalur, yaitu ekspor dan impor . Dalam jalur ekspor misalnya ekspor barang , keadaan krisis bagi sebuah negara eksportir bisa terjadi baik karena harga di pasar

internasional dari komoditas yang di ekspor menurun secara drastis atau permintaan dunia terhadap komoditas tersebut turun secara signifikan..

Dalam hal impor , suatu kenaikan harga dunia yang signifikan atau suatu penurunan secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang besar dari persediaan dunia untuk suatu komoditas yang di perdagangkan di pasar global dapat menjadi suatu krisis ekonomi yang serius bagi negara-negara importir jika komoditas itu sangat crucial msalnya , beras atau minyak yang juga sering merupakan komoditas-komoditas kunci bagi masyarakat miskin.

5. Krisis Modal

Pengurangan modal didalam negeri dalam jumlah yang besar atau penghentian bantuan serta pinjaman luar negeri akan menjadi sebuah krisis ekonomi bagi banyak dunia miskin di dunia. Pelarian modal baik yang berasal dari sumber dalam negeri maupun luar negeri yang besar dan secara mendadak bisa menjelma menjadi sebuah krisis besar bagi ekonomi negara-negara yang sangat memerlukan modal investasi.

Dalam kasus ini , jalur-jalur tranmisi memiliki dampak utama yakni perubahan – perubahan dalam jumlah investasi , khususnya investasi jangka panjang , volume produksi dan jumlah tenaga kerja yang bekerja. Kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap krisis ekonomi dari kategori ini bisa kelompok miskin tetapi bisa juga kelompok non-miskin tergantung pada sektor atau industri yang paling dirugikan dengan kekurangan modal investasi.

C. SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

1. Sebelum Kemerdekaan

Pada masa ini, roda perekonomian Indonesia dikendalikan oleh para bangsawan, kerajaan-kerajaan lokal, dan para penjajah (Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang). Namun, pengaruh yang ditinggalkan Belanda yang telah menjajah Hindia Belanda (sebutan untuk Indonesia pada masa itu) selama 350 tahun sangat dalam. Negeri kincir angin itu juga telah menerapkan berbagai sistem yang masih dipakai hingga

saat ini. Beberapa kebijakan yang mereka berlakukan untuk Hindia Belanda diantaranya dengan membentuk Serikat Dagang Belanda VOC, Sistem Tanam Paksa (Cultuurstelsel), dan Sistem Ekonomi Pintu Terbuka (Liberal). VOC pada masa kejayaannya 1602-1799 telah menjadi penguasa Hindia Belanda dalam hal memonopoli komoditi-komoditi ekspor unggulan seperti, rempah-rempah, kopi, dan cengkeh. Belanda juga melakukan ekspor perak ke Hindia Belanda sebagai alat perimbangan dalam neraca pembayaran sampai tahun 1870-an. Akibat ketergantungan akan impor perak dari Belanda di masa VOC, sementara pasokan perak terganggu akibat adanya blokade Inggris di Eropa maka jatuhlah kekuasaan Belanda ke tangan Inggris atas Hindia Belanda. Pada saat itu juga terjadi krisis finansial di tubuh VOC, VOC bubar dan republik bataaf yang mengambil alih kekuasaan dari VOC juga belum sempat berbenah.

Inggris yang mengambil alih kekuasaan atas Hindia Belanda pada 1811-1816 mulai menerapkan sistem baru menggantikan sistem pajak hasil bumi (contingenten), yaitu Landrent (pajak tanah) yang telah berhasil diterapkan di India. Namun perubahan yang cukup mendasar dalam perekonomian ini sulit dilakukan, malah mengalami kegagalan sebelum akhirnya Inggris meninggalkan Hindia Belanda. Seiring dengan keberhasilan Belanda merebut kembali kekuasaan atas Hindia Belanda dari tangan Inggris, Belanda menerapkan sistem tanam paksa (Cultuurstelsel) pada tahun 1836. Sistem ini merupakan pengganti sistem landrent dalam rangka memperkenalkan penggunaan uang pada masyarakat pribumi. Masyarakat diwajibkan menanam tanaman komoditas ekspor dan menjual hasilnya ke gudang-gudang pemerintah untuk kemudian dibayar dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Masyarakat pribumi sangat tersiksa dengan sistem yang baru diterapkan pemerintah Belanda ini. Namun segi positifnya adalah mereka mulai mengenal tata cara menanam tanaman komoditas ekspor yang pada umumnya bukan tanaman asli Indonesia, dan masuknya ekonomi uang di pedesaan yang memicu meningkatnya taraf hidup mereka. Pemerintah Belanda berhasil menerapkan sistem barunya ini, masyarakat sudah bisa menyerap barang-barang impor yang mereka bawa masuk ke Hindia Belanda. Hal inilah yang merubah cara hidup masyarakat pedesaan

menjadi lebih komersial, tercermin dari meningkatnya jumlah penduduk yang melakukan kegiatan ekonomi nonagraris.

2. Setelah Kemerdekaan

a. Orde Lama

Pasca kemerdekaan, Indonesia mulai menggerakkan roda perekonomiannya sendiri. Pada masa pemerintahan Presiden Soekarno yang lebih dikenal dengan sebutan orde lama pembangunan ekonomi Indonesia dapat dibagi mejadi;

- 1) masa pasca kemerdekaan (1945-1950)
- 2) masa demokrasi liberal (1950-1957)
- 3) masa demokrasi terpimpin (1959-1967)

Pada masa pasca kemerdekaan, pembangunan sistem ekonomi Indonesia banyak mengalami jatuh bangun. Pemerintah pada saat itu dihadapkan pada masalah tingkat inflasi yang tinggi, pintu perdagangan luar negeri RI yang ditutup oleh Belanda, kas negara yang kosong, dan eksploitasi besar-besaran di masa penjajahan. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah untuk keluar dari keterpurukan ekonomi di tanah air, seperti menyerahkan perekonomian Indonesia pada pasar, inilah yang menandai dimulainya masa demokrasi liberal.

Kenyataannya, sistem ekonomi liberal ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Akhirnya setelah dikeluarkannya dekrit presiden 5 Juli 1959, sistem ekonomi liberal diganti dengan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonomi Indonesia yang menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Namun, kembali Indonesia menemui kegagalan dimana tingkat inflasi yang tinggi akibat kegagalan kontrol pasca devaluasi. Selain itu pemerintah juga tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah, serta adanya politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara barat.

b. Orde Baru

Pada masa ini, stabilisasi ekonomi dan stabilisasi politik menjadi prioritas utama. Program pemerintah berorientasi pada usaha pendalian inflasi,

penyelamatan keuangan negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Pemerintah Indonesia orde baru juga belajar dari pengalaman masa lalu, dimana sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi terpimpin tidak memperbaiki keadaan, maka dipilihlah sistem ekonomi baru, yaitu *sistem ekonomi campuran* dalam kerangka sistem ekonomi demokrasi pancasila. Dari sistem ekonomi yang baru inilah kemudian pemerintah menyusun kebijakan ekonominya yang diarahkan pada pembangunan di segala bidang.

Dampak positif dari sistem ekonomi campuran di orde baru ini antara lain, seperti;

- 1) Berhasil swasembada beras
- 2) Penurunan angka kemiskinan
- 3) Perbaikan indikator kesejahteraan rakyat (angka partisipasi pendidikan, penurunan angka kematian bayi, dan industrialisasi)
- 4) Berhasil menyelenggarakan preventive check (program KB, usia minimum orang yang akan menikah)

Sedangkan dampak negatifnya, seperti;

- 1) Pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumber daya alam
- 2) Perbedaan ekonomi antar golongan yang tajam
- 3) Penumpukan hutang luar negeri
- 4) Timbulnya konglomerasi pembangunan, korupsi, kolusi, dan nepotisme

c. Orde Reformasi

Pada awal orde reformasi pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang lebih diutamakan untuk stabilitas politik, ketimbang mengatasi masalah ekonomi yang diwariskan orde baru, antara lain; KKN, pemulihan ekonomi, buruknya kinerja BUMN, pengendalian inflasi, dan mempertahankan kurs rupiah.

D. FACTOR PENYEBAB KRISIS EKONOMI

1. Fenomena productivity gap (kesenjangan produktifitas) yang erat berkaitan dengan lemahnya alokasi aset ataupun faktor-faktor produksi.

2. Fenomena diequilibrium trap (jebakan ketidak seimbangan) yang berkaitan dengan ketidakseimbangan struktur antarsektor produksi
3. Fenomena loan addiction (ketergantungan pada hutang luar negeri) yang berhubungan dengan perilaku para pelaku bisnis yang cenderung memobilisasi dana dalam bentuk mata uang asing (foreign currency).

E. DAMPAK KRISIS EKONOMI

Krisis ekonomi yang sedang dialami oleh beberapa negara besar di dunia diantaranya AS secara tidak langsung mempengaruhi perekonomian di Indonesia. Maka dari itu pemerintah harus waspada dan antisipatif, karena resesi ekonomi AS kemungkinan semakin parah sehingga bisa berdampak hebat terhadap kehidupan ekonomi di dalam negeri

Krisis ekonomi global bisa diumpamakan sebagai deretan kartu domino yang diatur sejajar, jika pemain utamanya terjatuh maka akan membawa dampak buruk terhadap yang lainnya. Celakanya, jika negara-negara berkembang yang terkena krisis ekonomi, lembaga-lembaga keuangan internasional cenderung lepas tangan. Akibatnya, krisis yang terjadi bisa sangat parah dan potensial mengimbas ke wilayah lain.

Dampak dari krisis ekonomi dengan sumber-sumber berbeda tergantung pada sifat dan besarnya keterkaitan :

- 1) Krisis Produksi domestik dan dampaknya terhadap kemiskinan
- 2) Krisis Perbankan dan dampaknya terhadap kemiskinan
- 3) Krisis nilai tukar dan dampaknya terhadap kemiskinan
- 4) Krisis perdagangan dan dampaknya terhadap kemiskinan
- 5) Krisis modal dan dampaknya terhadap kemiskinan

F. BEBERAPA SOLUSI MENGATASI KRISIS EKONOMI GLOBAL OLEH PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Presiden menegaskan 10 langkah yang harus ditempuh semua pihak untuk menghadapi krisis keuangan yang terjadi di Amerika Serikat (AS), sehingga tidak berdampak buruk terhadap pembangunan nasional.

Pertama, Presiden mengajak semua pihak dalam menghadapi krisis global harus terus memupuk rasa optimisme dan saling bekerjasama sehingga bisa tetap menjaga kepercayaan masyarakat.

Kedua, pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen harus terus dipertahankan antara lain dengan terus mencari peluang ekspor dan investasi serta mengembangkan perekonomian domestik.

Ketiga adalah optimalisasi APBN 2009 untuk terus memacu pertumbuhan dengan tetap memperhatikan `social safety net` dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan yaitu infrastruktur, alokasi penanganan kemiskinan, ketersediaan listrik serta pangan dan BBM.

Untuk itu perlu dilakukan efisiensi penggunaan anggaran APBN maupun APBD khususnya untuk peruntukan konsumtif.

Keempat, ajakan pada kalangan dunia usaha untuk tetap mendorong sektor riil dapat bergerak. Bila itu dapat dilakukan maka pajak dan penerimaan negara bisa terjaga dan juga tenaga kerja dapat terjaga. Sementara Bank Indonesia dan perbankan nasional harus membangun sistem agar kredit bisa mendorong sektor riil.

Di samping itu, masih menurut Kepala Negara, pemerintah akan menjalankan kewajibannya untuk memberikan insentif dan kemudahan secara proporsional.

Kelima, semua pihak lebih kreatif menangkap peluang di masa krisis antara lain dengan mengembangkan pasar di negara-negara tetangga di kawasan Asia yang tidak secara langsung terkena pengaruh krisis keuangan AS.

Keenam, menggalakkan kembali penggunaan produk dalam negeri sehingga pasar domestik akan bertambah kuat.

Ketujuh, perlunya penguatan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, Bank Indonesia, dunia perbankan serta sektor swasta.

Kedelapan, semua kalangan diharapkan untuk menghindari sikap ego-sentris dan memandang remeh masalah yang dihadapi.

Kesembilan, mengingat tahun 2009 merupakan tahun politik dan tahun pemilu, kaitannya dengan upaya menghadapi krisis keuangan AS adalah memiliki pandangan politik yang non partisan, serta mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan golongan maupun pribadi termasuk dalam kebijakan-kebijakan politik.

Kesepuluh, Presiden meminta semua pihak melakukan komunikasi yang tepat dan baik pada masyarakat. Tak hanya pemerintah dan kalangan pengusaha, serta perbankan, Kepala Negara juga memandang peran pers dalam hal ini sangat penting karena memiliki akses informasi pada masyarakat.